

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah Selama Pandemi: Studi Eksplorasi Dengan Pendekatan Psikologi *Indigenus*

**Anggi Fithrian Fathimah¹, Mirza Fadhillah Al-Islami², Tiara Gustriani³, Harsa Afifatur Rahmi⁴,
Indra Gunawan⁵, Ivan Muhammad Agung⁶, Desma Husni⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} *Center for Indigenous Psychology,*

Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Anggifithrian100@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan merupakan perubahan sikap dan tingkah laku sebagai upaya memenuhi permintaan ataupun perintah dari orang lain. Kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi memiliki peran penting dalam pencegahan penularan Corona Virus Disease (Covid-19). Namun masih terdapat individu yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan anjuran pemerintah selama covid-19 dan apa yang menjadi alasan individu menilai dirinya patuh. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 325 partisipan yang terdiri dari 74 laki-laki dan 251 perempuan. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Provinsi Riau dan masyarakat dari luar Provinsi Riau yang telah mengisi kuesioner pertanyaan terbuka secara online. Data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan content analysis yang dikategorisasi melalui tahapan open coded, axial coded dan selective coded. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bersikap patuh. Individu dalam penelitian ini menganggap dirinya patuh karena faktor kesadaran diri, manfaat, percaya kepada pemerintah dan persepsi ancaman.

Kata Kunci: *Indigenous Psychology, Kepatuhan, Pandemi*

Abstract

Obedience is the change of attitude and behavior as the effort to fulfill the request or instruction from other people. Obedience in applying health protocol during pandemic has important role in preventing the transmission of Corona Virus Disease (Covid-19). However, there is still individual who does not obey those regulations. The purpose of this research was to find out the level of community obedience towards the regulation and government advice during Covid-19 and to find out the factors that become the individual's reason assessing themselves as obedient. Total participants in this research were 325 participants consisted of 74 males and 253 females. The participants in this research consisted of Riau Province people and the people outside Riau Province who already fulfilled the open questions questionnaire online. Data were collected and analyzed by using content analysis categorized through stages namely open coded, axial coded, and selective coded. The results of this research show that most of the community behave obedience. The individuals in this research consider themselves obedient because of the factors such as self awareness, benefit, and belief towards the government and the threat perception.

Keywords: *Indigenous Psychology, Obedience, Pandemic*

Pendahuluan

Sebagai upaya menangani mewabahnya *Corona Virus Disease* (Covid-19), pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini menurut Tuwu (2020) diantaranya adalah *stay at home*, *social distancing*, *physical distancing* dan penggunaan alat pelindung diri (masker). Akan tetapi, ternyata kebijakan-kebijakan ini belum diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran protokol kesehatan di kota Pekanbaru dan juga kenaikan angka positif Covid-19 yang semakin tinggi (Antarnews.com, 30 Agustus 2020).

Kepatuhan menjadi hal paling mendasar sebagai langkah awal dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Kooistra, Folmer, Kuiper dkk. (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan memegang peranan penting dalam mengurangi kematian dan sistem keperawatan yang membebani secara berlebihan. Penelitian Harlianty, Widyastuti, Mukhlis dan Susanti (2020) menyatakan bahwa kepatuhan juga berhubungan dengan *awareness* terhadap Covid-19. Hal ini dapat dipahami bahwa perilaku patuh dapat merepresentasikan bahwa masyarakat telah memahami bahaya Covid-19.

Kepatuhan merujuk pada jenis respon tertentu (persetujuan) terhadap jenis komunikasi tertentu (permintaan) (Cialdini & Goldstein, 2004). Kepatuhan dapat dikatakan terjadi apabila seseorang menerima pengaruh dari orang lain. Hal ini terjadi karena individu berusaha untuk diterima atau disenangi, menghindari hukuman, berharap memperoleh penghargaan atau persetujuan dari orang lain (Kelman, 1958). Dengan demikian, kepuasan yang diperoleh dari bertindak patuh (melakukan kepatuhan) adalah karena penerimaan sosial yang diperoleh dari sikap menerima pengaruh dari orang lain. Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan anjuran pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Tindakan seseorang untuk patuh dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup otoritas atau figur yang memiliki peran atau pengaruh, kelangkaan, validasi sosial, *liking* atau karena perasaan suka, perilaku timbal balik (*reciprocation*), konsistensi dan komitmen perilaku (Cialdini & Trost, 1998). Sementara itu, penelitian terkait kepatuhan selama pandemi menemukan bahwa tindakan patuh didorong oleh kondisi ekonomi (Wright A. L., Sonin, K., Driscoll, J. & Wilson, J., 2020), motivasi intrinsik seperti ketika individu merasa mampu untuk patuh, memiliki *impulse control* yang baik, pemikiran bahwa kepatuhan adalah normal dan ketika ada kewajiban untuk mematuhi (Folmer, Kuiper, Olthius dkk. 2020). Selain itu, terdapat pula beberapa indikasi bahwa alasan ekstrinsik perilaku patuh adalah adanya kemungkinan hukuman dan penegakan keadilan (Folmer, Kuiper, Olthus dkk. 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa patuh masyarakat terhadap aturan dan anjuran pemerintah selama pandemi. Peneliti juga berusaha mengeksplorasi apa yang menjadi alasan individu menilai dirinya telah

mematuhi aturan dan anjuran pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Psikologi *Indigenous* sebagai upaya membangun konsep ilmiah berdasarkan masyarakat dalam konteks Indonesia.

Metode

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat yang berada di Provinsi Riau dan di luar Provinsi Riau yang telah mengisi kuesioner pertanyaan terbuka secara online. Total partisipan adalah 325 orang yang terdiri dari 74 laki-laki dan 251 perempuan, dengan rentang usia 15-64 tahun.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan *open ended questionnaire* yang terdiri dari dua pertanyaan. Pertanyaan pertama menanyakan seberapa patuh partisipan terhadap anjuran dan aturan pemerintah (penggunaan masker, jaga jarak, dll) terkait penanganan Covid-19. Pertanyaan kedua, menanyakan alasan mengapa partisipan menilai dirinya mematuhi aturan tersebut. Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan *Statistical Package for the Social Science (SPSS) 23 for windows*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Psikologi *Indigenous* dengan *content analysis* dan *frequency analysis*. *Content analysis* dilakukan dengan melakukan tiga (3) tahapan yang terdiri dari: *Open coding*; *axial coding*; dan *selective coding* (Fathurochman dkk, 2017). Selanjutnya, tema-tema yang diperoleh akan dianalisis menggunakan SPSS untuk memperoleh pemaparan deskriptif yang terperinci.

Hasil

Tabel 1 memperlihatkan distribusi jawaban responden terhadap pertanyaan “Menurut Anda, seberapa patuh diri Anda terhadap anjuran dan aturan pemerintah (masker, jaga jarak, dll) terkait penanganan Covid-19? Total 83 responden memberikan jawaban sangat patuh (25.2%) dan 160 responden menjawab patuh (49.2%). Sedangkan 81 responden menjawab cukup patuh (24.9%) dan 1 responden menjawab sangat tidak patuh (0.3%). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menilai diri mereka patuh terhadap aturan dan ajuran pemerintah terkait penanganan covid-19.

Tabel 1. Respon Kepatuhan Masyarakat Selama Pandemi

Kategori	Jumlah (n)	Persentase
Patuh	160	49.2%
Cukup Patuh	83	25.5%
Sangat Patuh	81	24.9%
Sangat Tidak patuh	1	0.3%
Total	325	100%

Jika dilihat dari jenis kelamin, penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan

responden laki-laki (74 responden) menjawab cukup patuh. Sementara sebagian besar perempuan (160 dari 251 responden) menjawab patuh.

Tabel 2. Kepatuhan Ditinjau dari Jenis Kelamin

	Perempuan	Laki-laki	Total
Cukup Patuh	9	74	83
Patuh	160	0	160
Sangat Patuh	81	0	81
Sangat Tidak Patuh	1	0	1
Total	251	74	325

Tabel 3. menunjukkan alasan responden menilai dirinya patuh terhadap anjuran dan aturan pemerintah terkait penanganan covid-19. Terdapat lima kategori penilaian, yaitu kesadaran diri (54.4%), manfaat (29.8%), percaya pada pemerintah (2.4%), persepsi ancaman (1.8%) dan lainnya (9.8%).

Tabel 3. Alasan Individu Menilai dirinya Patuh

No.	Kategori	Jumlah (n)	Persentase
1	Kesadaran diri	177	54.4%
	Mengikuti aturan	172	2.8%
	Menerapkan aturan pemerintah	5	97.2%
2	Manfaat	97	29.8%
	Kepedulian	36	37.1%
	Agar sehat	32	33.0%
	Pengendalian Covid-19	18	18.6%
	Pencegahan	11	11.3%
3	Percaya pada pemerintah	8	2.4%
4	Persepsi ancaman	6	1.8%
5	Lain-lain	37	11.4%
	Irrelevant	19	51.4%
	Inkonsistensi	15	40.5%
	Faktor situasional	3	8.1%
	Total	325	100%

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu menilai dirinya telah mematuhi aturan dan ajuran pemerintah dengan berbagai alasan, yaitu karena kesadaran diri, manfaat, percaya pada pemerintah dan persepsi ancaman.

Pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan wawasan mengenai alasan-alasan dari tingkah laku atau pemahaman diri sendiri (Maharani & Mustika, 2016). Kesadaran individu dalam konteks ini mencakup menerapkan aturan pemerintah dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Responden yang menerapkan aturan pemerintah

mengungkapkan bahwa perilaku sehari-harinya telah sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Sementara yang dimaksud mengikuti aturan pemerintah adalah responden mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti *stay at home*, menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari keramaian. Temuan ini merepresentasikan penelitian Harlianty, Widyastuti, Mukhlis dan Susanti (2020) bahwa kesadaran akan Covid-19 memainkan peranan penting dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat.

Kedua, manfaat. Penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang bersikap patuh kerana hal tersebut memberikan manfaat bagi orang lain. Adapun manfaat yang termasuk dalam kategori ini adalah kepedulian, agar sehat, pengendalian Covid-19 dan pencegahan. Kepedulian yang dimaksud adalah sikap yang tidak hanya memikirkan kebaikan untuk diri sendiri, tetapi juga memikirkan kemaslahatan orang lain. Selain itu, partisipan menyatakan bahwa mematuhi kebijakan terkait Covid-19 adalah untuk menjaga kesehatan diri, keluarga dan orang-orang terdekatnya. Begitu pula tindakan mematuhi anjuran dan aturan pemerintah yang dapat membantu mengendalikan penyebaran dan mencegah tertular Covid-19.

Adanya persepsi manfaat yang diperoleh partisipan ketika mematuhi aturan dan anjuran pemerintah ini sejalan dengan Meirer dan Morgan (1982) yang menyatakan bahwa seseorang akan mempertimbangkan utilitas (manfaat atau kegunaan) dari perilakunya mematuhi atau tidak mematuhi aturan. Seseorang akan bertindak patuh apabila ia memperoleh keuntungan atau manfaat yang lebih besar ketika mematuhi aturan atau kebijakan daripada ketika ia tidak mematuhi aturan atau kebijakan tersebut, begitu pula sebaliknya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purwanti dan Nurhayati (2017) yang menemukan bahwa persepsi manfaat merupakan salah satu faktor dominan dalam perilaku kepatuhan pasien. Begitu pula dengan penelitian Damanik (2019), yang menunjukkan bahwa persepsi manfaat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam konteks wajib pajak.

Ketiga, percaya pada pemerintah. Kepercayaan didefinisikan sebagai penilaian kolektif satu kelompok atas kelompok lain, bahwa mereka akan bertindak jujur dan tidak menyebabkan kerugian (Arwati & Latif, 2019). Sebuah kepercayaan diberikan disebabkan adanya pengetahuan tentang kebaikan atas aturan yang dibuat. Kepercayaan ini muncul karena responden menganggap bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah dipikirkan dengan matang, memiliki manfaat dan mengarah pada kebaikan.

Pemerintah merupakan figur otoritas (*authority*) yang memiliki peran atau pengaruh bagi individu atau kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat Cالدiani dan Trost (1998) bahwa *authority* merupakan salah satu faktor dari kepatuhan. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan temuan Clark, Devila, Regis dan Kraus (2020) yang melakukan penelitian dengan mengikutsertakan 70 negara berbeda, yang menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memberikan sumbangan (meskipun sangat kecil) terhadap perilaku kepatuhan selama pandemi Covid-19.

Keempat, persepsi ancaman. Persepsi ancaman merupakan keadaan dimana individu mempersepsikan sebuah situasi negatif yang membuat mereka membutuhkan perlindungan diri (Reymond dalam Arqi dkk. 2016). Dalam *intergroup threat theory* (Stephan, Ybarra & Morrison, 2009), persepsi ancaman dibagi menjadi dua yaitu ancaman realistik dan simbolik. Ancaman realistik berhubungan dengan fisik (rasa sakit, siksaan dan kematian). Sementara ancama simbolik berhubungan dengan agama, ideologi ataupun kepercayaan. Dalam kaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan anjuran pemerintah selama covid-19, maka persepsi ancaman yang dimaksud adalah perspsi ancaman simbolik atau fisik. Ketakutan akan terjangkit virus menjadi salah satu alasan responden bertindak patuh.

Persepsi ancaman dalam tulisan Meirer dan Morgan (1982) disebut *enforcemen*, yaitu ketakutan akan resiko yang meningkatkan harga dari ketidakpatuhan. Adanya kemungkinan ancaman (dapat berupa hukuman atau sanksi) menjadi faktor individu bertindak patuh. Oleh karena itu, adanya resiko individu tertular Covid-19 menjadi alasan ia bertindak patuh. Selain itu, penelitian Folmer, Kuiper, Olthus dkk. (2020) terhadap perilaku *social distancing* di Netherlands juga menunjukkan bahwa adanya kemungkinan hukuman dan penegakan keadilan sebagai salah satu alasan ekstrinsik perilaku kepatuhan.

Kategori *lainnya* dalam penelitian ini memuat inkonsistensi dan faktor situasional. Inkonsistensi yang dimaksud adalah ketidakkonsistenan responden dalam mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Perilaku-perilaku dari inkonsistensi ini diantaranya adalah responden terkadang masih lupa untuk menggunakan masker, masih membuat kerumnan dan sering keluar rumah. Selanjutnya faktor situasional yang dimaksud adalah responden tinggal di lokasi yang belum terinfeksi Covid-19 dan karena ada uzur tertentu sehingga kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah belum bisa diukur.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Masyarakat menganggap dirinya telah mematuhi aturan dan anjuran pemerintah karena adanya kesadaran diri, manfaat yang diperoleh, kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi ancaman dan faktor lainnya. Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan mengingat kepatuhan selama pandemi bersifat dinamis. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pengembangan aitem pertanyaan dan menggunakan subjek yang lebih luas.

Referensi

Arwati, D., & Latif, D. V. (2019). Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Transparansi Keuangan dalam E Government Kota Bandung. JBMP (Jurnal

- Bisnis, Manajemen dan Perbankan). 5(2), 66-74.
<https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2.2736>
- Arqi, M., Chusniyah, T., & Priyambodo, A. B. (2016). Persepsi Ancaman sebagai Prediktor Intoleransi Politik Terhadap Jamaah Ahmadiyah pada Jamaah Nahdlatul Wathan Pancor Lombok Timur. Skripsi Jurusan Psikologi-Fakultas Pendidikan Psikologi UM. Diunduh dari: http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_300151901601.pdf
- Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. (2004). Social influence: Compliance and conformity. *Annu. Rev. Psychol.*, 55, 591-621.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142015>
- Clark, C., Davila, A., Regis, M., & Kraus, S. (2020). Predictors of COVID-19 voluntary compliance behaviors: An international investigation. *Global transitions*, 2, 76-82. <https://doi.org/10.1016/j.glt.2020.06.003>
- Damanik, A. (2019). Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan E-Filing dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. (Thesis). Diunduh dari: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21691>
- Driscoll, J., Sonin, K., Wilson, J., & Wright, A. L. (2020). Poverty and Economic Dislocation Reduce Compliance with COVID-19 Shelter-in-Place Protocols.
- Folmer, C. R., Kuiper, M., Olthuis, E., Kooistra, E. B., de Bruijn, A. L., Brownlee, M., ... & van Rooij, B. (2020) Compliance in the 1.5 Meter Society: Longitudinal Analysis of Citizens' Adherence to COVID-19 Mitigation Measures in a Representative Sample in the Netherlands. Diunduh dari: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3624959
- Folmer, C. R., Kuiper, M. E., Olthuis, E., Kooistra, E. B., de Bruijn, A. L., Brownlee, M., ... & van Rooij, B. (2020). Sustaining Compliance with Covid-19 Mitigation Measures? Understanding distancing behavior in the Netherlands during June 2020. *Understanding Distancing Behavior in the Netherlands during June*. Diunduh dari: <https://psyarxiv.com/xafwp/download?format=pdf>
- Fathurochman, Wenty M. M., & Tabah A. N. (2017). *Memahami dan Mengembangkan Indigenous Psychology*. Pustaka Pelajar.
- Harlianty, R. A., Widyastuti, T., Mukhlis, H., & Susanti, S. (2020). Study on Awareness of Covid-19, Anxiety and Compliance on Social Distancing in Indonesia During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-44598/v1>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1696890/riau-alami-lonjakan-lebih-1000-kasus-covid-19-pada-agustus>

- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of conflict resolution*, 2(1), 51-60.
<https://doi.org/10.1177/002200275800200106>
- Kim, U., Yang, K., & Hwang, K. (2006) *Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context*. Springer.
- Kooistra, E. B., Reinders Folmer, C., Kuiper, M. E., Olthuis, E., Brownlee, M., Fine, A., & van Rooij, B. (2020). Mitigating covid-19 in a nationally representative uk sample: Personal abilities and obligation to obey the law shape compliance with mitigation measures. Available at SSRN 3598221. Diunduh dari: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3598221
- Maharani, L., & Mustika, M. (2016). Hubungan *self-awareness* dengan kedisiplinan peserta didik kelas VIII di SMP Wiyatama Bandar Lampung (Penelitian korelasional bidang Bk pribadi). *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 3(1), 57-72. Diunduh dari: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli/article/view/555>
- Meier, K. J., & Morgan, D. R. (1982). Citizen compliance with public policy: The national maximum speed law. *Western Political Quarterly*, 35(2), 258-273.
<https://doi.org/10.1177/106591298203500211>
- Purwanti, L. E., & Nurhayati, T. (2017). Analisis faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan pasien DM tipe 2 dalam melakukan perawatan kaki. *Journal of Health Sciences*, 10(1). Diunduh dari: <http://journal.unusa.ac.id/index.php/jhs/article/view/377>
- Stephan, W., Ybaraa, O. & Morrison, K. R., (2009). *Intergroup Threat Theory*. Dalam T. Nelson (Ed.) *Handbook of prejudice*. Mahwah, NJ: Lawrence Elbaum. Diunduh dari: https://www.researchgate.net/publication/285515618_Intergroup_threat_theory
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267-278. <http://dx.doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>